



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**RANCANGAN
RENCANA KERJA (RENJA) PENYELARASAN
KECAMATAN WANADADI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Penyelarsan Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Penyelarsan Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran rencana kerja dan Anggaran/pendanaan serta penutup.

Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2023-2026, Reviu Renstra dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Penyelarsan ini ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, 30 Oktober 2023

CAMAT WANADADI,


SAPTO AJI, SH, M.Si
NIP. 19690929 199403 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	31
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	35
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
2.7. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	59
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3. Program dan Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara 18

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 30

Tabel 2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... 31

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara 40

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara 53

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara 58

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Wanadadi) . 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2009 tentang RPJP. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis

kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan penunjang fungsi kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. Rp.1.795.930.280,-, dengan fokus utama pada bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang ada di Kecamatan, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu tanpa didasari paksaan serta penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pungut pajak.
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas (belum semua pelaksana dan pejabat struktural terpenuhi fasilitas laptop dan printer) sebagai penunjang pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah.

Dari 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. Rp.1.795.930.280,-.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (lima) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 1 (Satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - d.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - d.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - e.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni :
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terdiri dari 1(satu) sub Kegiatan :
 1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 5 (lima) sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan desa
 2. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 3. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum

4. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
5. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah. Dari 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 9 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp1.806.080.280-.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan sub Kegiatan yang bertambah adalah :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
2. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor Dan Bangunan Lainnya,

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yaitu jumlah pelayanan KTP dan KK di Kecamatan Wanadadi. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah

1. Adanya Program Pandusaling dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga pelayanan KTP dan KK sudah banyak dilaksanakan di desa.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan. Fasilitas / Aplikasi perekaman data KTP sering mengalami gangguan sehingga menghambat pelayanan pembuatan KTP.
3. Kurangnya ketertiban administrasi di kecamatan yang menyebabkan adanya dokumen/STNK yang hilang sehingga tidak bisa dibayarkan pajak kendaraan dinas tersebut.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistic kantor, pengadaan sarana dan prasara pendukung Gedung kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Target SKM 84,8 dapat mencapai nilai 88,01. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat, sub kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di limpahkan jumlah penyaluran SPPT PBB mencapai 100% dan menjadi peringkat 2 pelunasan PBB tercepat se Kabupaten Banjarnegara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung dalam melaksanakan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
2. Faktor Anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.;
3. Koordinasi Internal yang mendukung pencapaian target sesuai komitmen bersama.
4. Melakukan himbauan secara intensif di setiap kegiatan, rapat, upacara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti pelunasan PBB secara tepat waktu tanpa adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Monitoring dan Koordinasi internal yang intensif dalam upaya meningkatkan Kinerja pegawai dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Anggaran belanja yang dapat mendukung semua Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang direncanakan secara maksimal

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target progra m dan kegiata n Renja Perangk at Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perang kat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/ 6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
I	Sasaran Strategis									
		Nilai IKM	83,4	83,4	83,2	88	105,7 7	84	255,4	3,06
		Nilai SAKIP	CC	51,98 / CC	53/ CC	49,15 / C	C	CC	CC	CC

		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	100%	100 %	100 %	100	100	100%	100%	100%
I	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
1.1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target progra m dan kegiata n Renja Perangk at Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisa si Renja Perangk at Daerah tahun 2022	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.1	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan	16 Orang	13 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	45	2,8125
2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		pelayanan administrasi umum perangkat daerah								
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	1	1	100	1	4	4
3.2	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11 Paket	5 Paket	11 Paket	11 Paket	100	11 Paket	27	2,454545 455
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	3 Unit	3 Unit	100	1	4	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target progra m dan kegiata n Renja Perangk at Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisa si Renja Perangk at Daerah tahun 2022	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	2 Paket	8 PAket	4 Paket

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10	7	6	6	100	10	23	2,3
6.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan aula yang terpelihara	2	2	2	2	100	2	6	3
II	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	12	8060	1770	511	28,87	12	8583	71525
7.2	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	25747	19.800	20614	104,1 1	1	46362	4636200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
III	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
8.1	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca	6	6	6	6	4	6	18	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.1	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11	11	11	11	100%	11	18 desa	
9.2	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	11	11	11	100%	1	18	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
9.3	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	1	11	11	11	100%	1	23	2
9.4	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	2	11	11	11	100%	1	23	1
8.5	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	11	11	11	100%	3	25	8,33

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai yaitu nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan Target nilai 83,2 mencapai nilai 88 dan Persentase Realisasi SPPT PBB mencapai 100%. Sedangkan indikator yang tidak tercapai yaitu Nilai SAKIP Kecamatan , dimana target nilai 53 hanya mencapai 49,15.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Target Nilai IKM tersebut antara lain adalah:

1. Telah tersedianya Standar Operasional Pelayanan dan maklumat Pelayanan;
2. Petugas pelayanan telah memahami syarat dan prosedur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.;
3. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam memberikan pelayanan;
4. Komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan petugas pelayanan yang ada di desa;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya kepada atasan.
6. Monitoring dan evaluasi yang intensif dalam upaya meningkatkan kinerja serta pendisiplinan jam kerja sehingga bisa menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan wilayah kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi masing – masing Aparatur Sipil Negara.
7. Melakukan himbauan di setiap kegiatan, didesa untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti percepatan pelunasan PBB .

8. Monitoring dan evaluasi yang intensif pada petugas pemungut Pajak guna menghindari penyelewengan dan keterlambatan dalam penyetoran Pajak tersebut.

Adapun Faktor yang mempengaruhi ketidak tercapainya Nilai SAKIP antara lain :

1. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
2. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih kurang dari instansi pengampu.
3. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam penyusunan dokumen perangkat daerah.

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya di wilayah Kecamatan Wanadadi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Adapun upaya-upaya dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat meliputi:

1. Diadakannya pembinaan dan pendampingan administrasi ke desa – desa yang dilakukan oleh Tim Kecamatan sesuai jadwal yang dtentukan, minimalnya 2 kali dalam 1 tahun.
2. Himbauan dari atasan kepada ASN yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya berdasarkan tupoksinya dan meminimalisir indiscipliner.
3. Melakukan himbauan di setiap kegiatan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti percepatan pelunasan PBB secara tepat waktu tanpa adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak dan mempedomani 12 etika budaya malu aparatur pemerintah desa sehingga aparatur pemerintah desa akan lebih loyal dalam bekerja sesuai tupoksinya dan tertib administrasi pemerintahan desa dan meningkatkan kedisiplinan jam kerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPP D	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP	-	-	52,00 / CC	52,80 / CC	62,70 / B	63,00 / B	49,15 / CC	62,70 / B	62,70 / B	63,00 / B	Nilai SAKIP
	Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	84,00	84,70	88,01	88,20	83,4	88,01	88,01	88,20	Nilai IKM
	Persentase Realisasi SPPT PBB			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Realisasi SPPT PBB

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

Lampiran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANG KAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIA TAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		Adanya ASN yang pensiun sehingga anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak terserap 100%	Memohon kebijakan kepada BKD untuk menambah ASN sesuai tupoksi	
				2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		Kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan meminimalisir penyelewengan dalam penyetoran uang pajak ke bank.	Monitoring dan evaluasi ke desa desa dengan melaksanakan program seperti pring pethuk nabung Bersama selama 1	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANG KAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIA TAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				3.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%		Administrasi pemerintahan di desa yang kurang tertib serta penginventarisiran asset desa yang perlu diadakan pembenahan dan sosialisasi	tahun untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Monito ring dan evaluasi dana desa se kecamatan yang dilakukan se cara berkala minimal 1 tahun 2 kali mo nev.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANG KAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIA TAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100%		pentingnya asset desa. Memecahkan Bersama isu strategis atau permasalahan yang terjadi di kecamatan serta mencari solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.	Adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin seperti sosialisasi tentang PBB dan 12 budaya malu bagi aparat desa.	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 4 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Keterbatasan SDM di Kecamatan Wanadadi,
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan Wanadadi sehingga menghambat pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan. (Belum meratanya fasilitas seperti laptop, printer dan PC untuk pelaksana dan pejabat struktural yang ada di Kecamatan Wanadadi sehingga menghambat penyeteroran Data dan laporan yang sesuai dengan deadline yang ditentukan)
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan dokumen kependudukan dan Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
4. Masih ada sebagian masyarakat belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu serta adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkannya ke bank

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak semua memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tidak relevan dengan uraian tugas dan menghambat tercapainya indikator kerja.
2. Beberapa sarana dan prasarana kelembagaan tidak dapat digunakan karena rusak ataupun karena belum memadai, dan banyak pelaksana serta pejabat struktural yang belum mendapatkan fasilitas laptop, printer dan PC sehingga menghambat ketepatan penyeteroran data maupun laporan.
3. Pelayanan kepada masyarakat terkesan lambat, karena kurang pahamiannya masyarakat tentang prosedur dan kelengkapan berkas yang diperlukan dalam pengurusan dokumen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan mendisiplinkan jam kerja ASN dengan aplikasi e-presensi dan e-kinerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat umum akan lebih optimal.
2. Menambah sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi pelayanan dan kinerja Pegawai di Kecamatan Wanadadi.

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan tertib administrasi desa dengan cara pengawasan dan pendampingan langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kecamatan Wanadadi oleh tim Kecamatan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat dan meningkatkan pelayanan prima.
5. Memanfaat anggaran yang terbatas dengan sebaik mungkin untuk mencapai target program/kegiatan yang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas, belum meratanya fasilitas bagi pelaksana dan pejabat struktural seperti laptop printer, dan masih kurangnya prasarana pendukung seperti LCD, lemari file, AC, CCTV.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan prosedur pelayanan dokumen.
3. Adanya ketidakdisiplinan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat ke bank.

4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kecamatan Wanadadi sehingga tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang optimal.
5. Kurangnya pagu anggaran di tahun berjalan sehingga tidak semua program kegiatan bisa dilaksanakan secara 100% dan target yang ditentukan juga tidak tercapai 100%.

2.5.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar

Rp 2.293.852.130,- yang terbagi dalam 4 program 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2024. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec . Wana dadi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota yang terlaksana	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	2.094.382.130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec . Wana dadi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota yang terlaksana	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	2.061.435.000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	11.351.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	11.500.000	

1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dok	3.500.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec . Wana dadi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	31 Lap	7.851.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec . Wana dadi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31 Lap	8.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.730.893.594	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.729.141.584	
2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec . Wana dadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 o/b	1.687.121.594	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec . Wana dadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 o/b	1.687.121.584	

2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dok	40.272.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dok	38.520.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Lap	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Lap	3.500.000	

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase administrrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	121.367.320	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase administrrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	128.686.000	
3.1	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.545.000	
3.2	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	113.867.320	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	115.141.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	34.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	69.102.000	

4.1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	24.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	44.162.000	
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	24.940.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	93.265.216	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	78.555.416	

5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	8.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	7.200.000	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	84.865.216	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	71.355.416	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	28.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	44.450.000	

61	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec . Wana dadi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	13.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec . Wana dadi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	12.450.000	
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wana dadi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	12.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wana dadi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	12.000.000	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wana dadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	3.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wana dadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	20.000.000	

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec . Wana dadi	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	75.505.000	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec . Wana dadi	Persentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	79.990.000	
7	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Kec . Wana dadi	Persentase terselenggarany a koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	10.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Kec . Wana dadi	Persentase terselenggaran ya koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	10.000.000	
7.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Dok	10.000.000	Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Dok	10.000.000	

			Pelayanan Umum			Pelayanan Umum		Pelayanan Umum			
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec . Wana dadi	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	65.505.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec . Wana dadi	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	69.990.000	
8.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen pelayanan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dok	1.800.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen pelayanan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dok	1.800.000	
8.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1700 Lap	9.100.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1700 Lap	4.050.000	
8.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain	20772 Lap	54.605.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain	20772 Lap	54.140.000	

	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		yang dilimpahkan			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		yang dilimpahkan			
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec . Wana dadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Nilai SAKIP Kecamatan	9.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec . Wana dadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Nilai SAKIP Kecamatan	9.600.000	
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pelaksanaan Tugas kepala Daerah yang terlaksana	100%	9.600.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pelaksanaan Tugas kepala Daerah yang terlaksana	100%	9.600.000	
9.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dok	9.600.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi	6 dok	9.600.000	

								Pimpinan di Kecamatan			
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec . Wana dadi	Persentase program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ter laksana	100%	114.365.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec . Wana dadi	Persentase program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ter laksana	100%	116.975.000	
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec . Wana dadi	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ter laksana	100%	114.365.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec . Wana dadi	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ter laksana	100%	116.975.000	
10.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	22 Dok	3.800.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	22 Dok	7.600.000	

			dan Peraturan Kepala Desa					dan Peraturan Kepala Desa			
10.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dok	10.190.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dok	11.500.000	
10.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dok	10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dok	25.000.000	
10.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec . Wana dadi	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Dok	7.925.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec . Wana dadi	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Dok	15.600.000	

10.5	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	11 Dok	26.700.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	11 Dok	26.975.000	
10.6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Dok	15.750.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Dok	30.300.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, tidak ada hal yang menjadi catatan.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Gumingsir	Jalan antar desa Linggasari dengan Desa Gumingsir masih berupa tanah dan batu Sehingga perlu dilakukan peningkatan Jalan antar Desa tersebut.	400 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
2	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Linggasari	Jalan antar desa Gumingsir dengan Desa Linggasari masih berupa tanah dan batu sehingga perlu dilakukan peningkatan Jalan antar Desa tersebut.	550 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

3	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Karangjambe	Jalan inspeksi antara jalan Desa Karangjambe - Desa Wanadadi	550 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
4	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Wanadadi	Pengaspalan jalan rusak dan berlubang.	650x3m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
5	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Dusun Karangjambu, Kandangwangi	kondisi jalan sudah rusak dan berlubang	2,6 X 1400 M	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
6	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Karangjambe rw 02, Karangjambe	Karena curah hujan yang tinggi maka banyak talud dan drainase yang rusak	Panjang 200 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Usaha Tani Dekat Lapangan Desa	Jalan Usaha Tani di Kadus I (Blok Lapangan Desa) sebagai Akses utama	550 m	DINTANKAN KP

		Karangkemiri (Kadus I)	petani dalam meningkatkan perekonomian, sudah sangat rusak apalagi ketika musim hujan, jalan tidak dapat dilewati kendaraan .		
No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
8	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kasilib,	banyak jalan desa terutama jalan lurung yang sudah rusak	PENGAS PALAN P=50M, L=4M	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
9	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Kadus 5 , Lemahjaya	aspal jalan desa di Kadus 5 dengan Panjang =3000 m dalam kondisi yang rusak, jalan tersebut merupakan akses satu satunya warga dalam kegiatan sehari hari, dengan akses jalan yang rusak maka kegiatan perekonomian menjadi terhambat, hasil panen warga juga	800 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

			susah untuk di jual, jalan tersebut belum dibangun karena Dana Desa Tidak dapat untuk membagnun selama 2 tahun karena untuk kegiatan penanganan COVID		
10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Blok sawah Janggleng, desa Linggasari,	Jalan Pertanian di blok sawah Janggleng, Desa Linggasari yang tepatnya berada persis di sebelah Jalan Kabupaten, kondisinya sebagian besar masih berupa tanah bergelombang dan pecahan batu. Hal ini Menyulitkan akses para petani menggunakan jalan pertanian tersebut.	Cor beton Jalan Usaha Tani Panjang : 200m x lebar 3,5m x tebal 15cm	DINTANKAN KP
11	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam	Desa Medayu,	Kebutuhan seperangkat wayang kulit untuk melengkapi gamelan yang sudah ada	1 set	DINBUDPAR

	Daerah Kabupaten/Kota)				
12	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Desa Tapen	Jalan desa kondisi rusak parah	1.500 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
13	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pariwisata Desa: Pengembangan pariwisata desa)	Seakong Agro Eduwisata, Dusun III Desa Wanadadi	Pengembangan Agro Eduwisata Seakong.	Untuk pengemb angan Seakong, peningka tan infrastru ktur jalan (pavingis asi) Volume : 3.080 m ²	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
14	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Desa Wanakarsa	Jalan Kabupaten yang ada di Desa Wanakarsa sudah rusak parah dan membahayaka n untuk pengguna jalan yang melintas.	1500m x 3,5m	DPUPR
15	Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Gunung Dusun Mergayasa Desa Gumingsir Kecamatan Wanadadi	Desa Gumingsir	kondisi jalan usaha tani yang belum dibangun secara permanen dan saat ini rusak	Panjang = 400 m Lebar = 2,5 m Tinggi = 0,15 m	DINTANKAN KP

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
16	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan baru Pucang Linggasari, desa Wanadadi, Tapen	Di jalan kabupaten tepatnya di ruas jalan Linggasari-Pucang, kondisi penerangannya sangat kurang. sehingga beberapa kali menyebabkan kecelakaan karena kurang penerangan jalan, Trafic light di perempatan pasar Wanadadi dan Tapen	2 paket	Dinas Perhubungan

2.7 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kependudukan;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Konsolidasi Demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hukum nasional;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah “*BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN*”

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat ;
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar;

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka

Kecamatan Wanadadi mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wanadadi sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah Misi Ketiga yaitu :

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab ;

Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan

perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat yang tentunya di dukung dengan fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai seperti pemerataan laptop untuk semua pegawai sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Wanadadi.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026 dan memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Wanadadi Tahun 2023-2026 Kecamatan Wanadadi menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Peralihan tahun 2023-2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terealisasinya program secara otomatis untuk perkantoran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program penataan administrasi kependudukan, program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Untuk mencapai tujuan Kecamatan Wanadadi memformulasikan sasaran strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia aparatur serta dengan terfasilitasinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dapat tercapai target kinerja 100%. Penambahan bahan logistik kantor untuk pemenuhan kebutuhan logistik kantor selama 1 tahun berjalan dan didukung sarana dan prasarana yang memadai yang akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur serta kelancaran birokrasi ataupun tata kelola pemerintahan yang baik tentunya di Kecamatan Wanadadi.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat.

Upaya dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wanadadi Program/kegiatan/ sub kegiatan Kecamatan Wanadadi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wanadadi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wanadadi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Cat atan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Pro gra m	Kelua ran Sub Kegia tan	Hasi l Kegi atan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec Wanadadi	100 %	18 Dok	1 Tahun	3.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusun nya dokumen perencanaan an	100%	5.000.000

7	1	1	2.01	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Wanadadi	100 %	31 doku men	1 tahu n	8.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Wanadadi		15 O/b	1 tahu n	1.687.121. 584		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	168.712.159
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksana penatausaha an keuangan yang terbayarkan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Wanadadi		60 Dok	1 tahu n	38.520.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	40.272.000

7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Wanadadi		38 Lap		3.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5.000.000
7	1	1	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah													
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor perangkat daerah	Kec Wanadadi		1 paket		13.545.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	7.500.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec Wanadadi		12 paket		115.141.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	120.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Kec Wanadadi		1 Unit	Pen gada an Print er scan er	44.162.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
7	1	01	207	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec Wanadadi		4 Unit		24.940.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu		100%	10.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Wanadadi		12 lap		7.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	8.400.000

7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Wanadadi		12 Lap		71.355.416		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	84.865.216
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Wanadadi		8 unit		12.450.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	13.000.000
7	1	1	2.09	002	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Wanadadi		4 unit		20.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	12.000.000

7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi / dipelihara	Kec Wanadadi		3 unit		12.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum													
7	1	2	2.3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terlaksana	Terlaksananya Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Wanadadi		1 Dok		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													

7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non- usaha	Cakupan Penyelenggara an Pemrintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Terlaksananya a Urusan Pemerintah n yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec Wanadadi		100 dok		1.800.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	1.800.000
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nont- perizinan	Cakupan Penyelenggara an Pemrintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec Wanadadi		1 700 lap		14.050.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	9.100.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Penyelenggara an Pemrintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Wanadadi		20772 Lap		54.140.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	54.605.000
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													

7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya tugas Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Wanadadi		6 dok		9.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	9.600.000
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	1	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Wanadadi		22 dok		7.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.800.000
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Wanadadi		11 Desa		11.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.190.000
7	1	06	2.01		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Wanadadi		1 desa		25.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000

							Pemilihan Kepala Desa											
7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec Wanadadi		19 dok		15.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	7.925.000
7	1	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Wanadadi		11 dok		26.975.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	26.700.000

7	1	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah n desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Wanadadi		11 lap		30.300.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	15.750.000
											TOTAL		2.268.000.000					672.219.375

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Wanadadi adalah Rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang diarahkan pada :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - 3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.2. Penyedia bahan logistik kantor
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - 4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - 5.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 5.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 6.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

7. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

Terdiri dari 1 sub Kegiatan yaitu :

7.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat.

Terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan :

8.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha

8.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perijinan

8.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan yaitu

9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Terdiri dari 1 sub kegiatan :

9.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan yaitu

10. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan 6 sub kegiatan yaitu :

- 10.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- 10.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- 10.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 10.4 Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 10.5. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 10.6 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Penyelarasan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Penyelarasan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Penyelarasan Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara

pada tanggal: 30 Oktober 2023
CAMAT WANADADI,

SAPTO AJI, SH, M.Si

NIP. 19690929 199403 1 010